

# Seorang Pangeran Batak di Belanda

**ULI KOZOK**

Professor in Indonesian, Department of Indo-Pacific Languages and Literatures, University of Hawaii at Manoa, United States  
Email: [info@ulikozok.com](mailto:info@ulikozok.com)

## Abstract

This article examines the life of Radja Hakim Abinari Tampoebolon, a Toba Batak figure who leveraged his purported princely title to launch a career that started as a police informant and eventually entangled him in right-wing private intelligence networks in the Netherlands. As a descendant of a colonial elite family, Hakim adopted a pro-Dutch and anti-independence stance. Together with his father, he supported the project of establishing a Tapanuli State within a Dutch-controlled Sumatran federation. In the Netherlands, Tampoebolon acted as a collaborator engaged in smuggling and conspiratorial networks, including assassination plots. The capital acquired from these illicit activities enabled him to establish a thriving company in Jakarta with a branch in Medan, following his return to Indonesia in 1950 with his Dutch wife. Amid the process of decolonisation, he recast himself as a national entrepreneur with direct access to the circles of senior officials of the Indonesian Republic. He succeeded in constructing a narrative that he had studied law in the Netherlands, earned a doctoral degree, and had even been imprisoned for his pro-independence stance—an account starkly at odds with his actual record of colonial collaboration. Tampoebolon's trajectory demonstrates the remarkable flexibility of the colonial elite, capable of redefining their roles and legitimacy in order to preserve influence within the postcolonial republic.

**Keywords:**  
Batak; Negara  
Tapanuli;  
decolonisation;  
intelligence  
networks;  
colonial elite;  
federalist states;  
Radja Hakim  
Tampoebolon

## Abstrak

Artikel ini menelusuri riwayat Radja Hakim Abinari Tampoebolon, seorang Batak yang memanfaatkan status sebagai “raja” untuk membangun karier yang berawal sebagai mata-mata kepolisian dan kemudian terlibat dalam jaringan dinas intelijen swasta berhaluan kanan di Belanda. Sebagai keturunan keluarga elite kolonial, Hakim menampilkan sikap pro-Belanda dan anti-kemerdekaan. Bersama ayahnya, ia mendukung gagasan pembentukan Negara Tapanuli dalam kerangka federasi Sumatra di bawah kendali Belanda. Di Belanda, Tampoebolon berperan sebagai kolaborator yang terlibat dalam penyelundupan dan jaringan konspiratif, termasuk komplottan pembunuhan. Modal yang diperoleh dari aktivitas ilegal ini digunakan untuk mendirikan perusahaan di Jakarta dengan cabang di Medan, setelah kembali ke Indonesia pada 1950 bersama istrinya yang berkebangsaan Belanda. Seiring proses dekolonisasi, ia membangun citra baru sebagai pengusaha nasional dengan akses langsung ke lingkaran pejabat tinggi Republik Indonesia. Ia berhasil membangun narasi bahwa dirinya adalah lulusan hukum Belanda, meraih gelar doktor, dan pernah dipenjara karena sikap pro-kemerdekaan—sebuah kisah yang berlawanan dengan

**Kata kunci:**  
Batak; Negara  
Tapanuli;  
dekolonisasi;  
jaringan  
intelijen;  
elite kolonial;  
negara federal;  
Radja Hakim  
Tampoebolon

jejak kolaborasi kolonialnya. Perjalanan hidup Tampoebolon menunjukkan betapa lenturnya identitas kaum elite kolonial yang mampu merumuskan ulang peran dan legitimasi mereka demi mempertahankan posisi dalam republik pascakolonial.

## Pendahuluan



Figur 1. Kop surat Raja Hakim Tampubolon semasa di Belanda

Artikel ini mengkaji kehidupan Radja Hakim Abinari Tampoebolon (1914–1987), sosok yang luar biasa namun hampir tidak dikenal—seorang Batak berpendidikan Belanda dari keluarga birokrat pro-Belanda, yang kariernya bergerak di sepanjang batas-batas kabur antara kolaborasi, perlawan-

dan strategi bertahan hidup pada masa-masa penuh gejolak menjelang dan sesudah kemerdekaan Indonesia.<sup>1</sup> Berangkat ke Belanda dengan dalih melanjutkan studi di Universitas Leiden, Tampoebolon justru muncul sebagai salah satu nata-mata terpenting di kepolisian Den Haag dengan tugas untuk memata-matai warga Indonesia pro-kemerdekaan. Selama pendudukan Jerman, ia menjalin hubungan baik dengan rezim Nazi dan terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal. Pada tahun 1949 ia kembali ke Indonesia untuk berperan sebagai perantara antara pemerintah kolonial Belanda dan para pendukung Negara Tapanuli, sebelum kemudian menetap di Indonesia pada awal 1950-an dan membangun karier sebagai pengusaha. Kisah hidupnya menawarkan sudut pandang yang unik bagaimana mantan elite kolonial berhasil menyesuaikan diri demi mempertahankan posisi dan pengaruh mereka di zaman kemerdekaan.

Artikel ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menempatkan Tampoebolon dalam konteks sejarah dan sosial elite Batak pro-Belanda di Tapanuli serta keterlibatan mereka dalam proyek Negara Tapanuli yang gagal, dengan menyoroti dilema kolaborasi federalis selama revolusi Indonesia. Kedua, merekonstruksi aktivitasnya di Belanda (1936–1950), menelusuri transformasinya dari seorang “pangeran” yang menempuh kuliah hukum menjadi informan dan infiltrator dalam Dinas Rahasia Kepolisian Belanda, serta kemudian bergabung dengan jaringan intelijen swasta sayap kanan. Bagian ini menelaah bagaimana identitas gandanya—bangsawan sekaligus mata-mata, intelektual sekaligus pelaku pasar gelap—mewujudkan strategi kelangsungan hidup di Eropa pada masa Perang Dunia Kedua. Ketiga, artikel ini mengikuti proses pembentukan jati dirinya setelah kemerdekaan Indonesia, ketika ia tampil sebagai pengusaha nasional dengan mendirikan N.V. Hasil di Jakarta dan Medan, sebelum akhirnya mengalami kemunduran dan tragedi pribadi. Bagian akhir ini menempatkan perjalanan kariernya

1) Foto-foto dalam artikel ini disediakan oleh Hakim Tampoebolon Jr.

dalam konteks lebih luas mengenai bagaimana mantan elite kolonial menata ulang posisi mereka sebagai pebisnis modern dalam republik yang baru lahir.

Selain tujuan biografis, artikel ini berkontribusi pada perdebatan historiografis yang lebih luas. Dengan menunjukkan bagaimana Tampoebolon memanfaatkan posisi di era kolonial serta pengalaman sebagai pelaku pasar gelap di Belanda menjadi modal ekonomi pada awal berdirinya Indonesia, kajian ini mengungkap keberlanjutan struktur kekuasaan kolonial dalam tatanan pascakolonial. Studi ini juga memperlihatkan bahwa dekolonisasi bukan merupakan pemutusan total dari masa kolonial, karena banyak aktor pro-Belanda tetap memainkan peran penting dalam republik baru melalui pencarian identitas dan posisi baru—sebagaimana diperlihatkan oleh Tampoebolon.

Dengan menelusuri perjalanan transnasional “pangeran Batak” ini dari Tarutung ke Den Haag dan kembali ke Jakarta dan Parapat, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih bernuansa mengenai bagaimana para perantara kolonial menegosiasikan kekuasaan, ideologi, dan identitas pada masa dekolonisasi.

### **Menciptakan Elite Batak Pro Belanda**

Di dalam kamus Batak-Belanda, H.N. van der Tuuk (1861:434) menjelaskan bahwa pada suku Batak Toba, setiap orang yang seketurunan dengan marga pendiri suatu kampung, berhak menyandang gelar raja. Oleh sebab itu, terdapat ratusan raja yang kedudukannya tidak lebih tinggi daripada kepala kampung. Salah satu di antaranya adalah Raja Hakim Abinari dari marga Tampubolon<sup>2</sup>, yang lahir pada 28 Oktober 1914 di Siborongborong, sekitar 10 kilometer di selatan Danau Toba.

Tampubolon pernah menulis sebuah artikel menarik tentang hari-hari terakhir Ompu Pulo Batu, Singamangaraja yang terakhir, yang gugur di tangan tentara Belanda pada tahun 1907 (Tampoebolon 1944). Dalam artikelnya, Tampubolon melontarkan kritik tajam terhadap antropolog Belanda F.M. Schnitger. Meskipun kritik tersebut tidak sepenuhnya keliru, menariknya, Schnitger menunjukkan simpati terhadap masyarakat pribumi, sedangkan Tampubolon justru terkesan lebih pro-Belanda.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, karya tulis berupa buku atau artikel yang ditulis oleh orang Batak sangat jarang ditemukan. Kendati demikian, Tampubolon, yang menandatangi artikelnya sebagai H.A.m. Tampoebolon, bukanlah sosok yang terkenal di dalam masyarakat Batak. Pencarian internet menghasilkan informasi yang sangat terbatas. Mengidentifikasi Radja H.A.m Tampubolon juga sulit karena ia menggunakan beragam penulisan nama yang berbeda seperti H.A.m., Hakim A. atau hanya H.A. Tampubolon.

---

2) Hingga tahun 1948, namanya dieja Radja Hakim Abinari marga Tampoebolon.

Didorong oleh rasa ingin tahu, penulis meminta dukungan dari sepuluh ribu pengikut Facebook-nya, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat Batak. Namun, tampaknya tidak ada satu pun yang pernah mendengar tentang H.A.m. Tampubolon. Terobosan pertama muncul ketika seorang pengikut menemukan bahwa H.A.m. adalah singkatan dari ‘Hakim Abinari marga’. Seorang pengikut lain menemukan profil media sosial seorang Belanda dengan nama yang sama, yang ternyata adalah anak kandungnya yang menetap di Belanda dan bersedia menjadi narasumber. Dengan informasi tersebut, akses ke lebih banyak sumber pun terbuka: sebuah biografi singkat yang ditulis oleh putranya Hakim Jr., beberapa artikel surat kabar yang menyebut Hakim Tampubolon, dan dua buku yang ditulis oleh peneliti Belanda Rudi Harthoorn tentang perlawanan komunis Belanda selama pendudukan Jerman dalam Perang Dunia II.

Selama masa penjajahan Belanda, keadaan di lembah Silindung di Karesidenan Tapanuli relatif tenang, dengan hanya sedikit perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Misionaris Jerman telah hadir di wilayah tersebut sejak tahun 1864, dan pada tahun 1878 mereka meminta bantuan tentara kolonial untuk mengusir Singamangaraja dari Bangkara, Toba. Raja imam orang Batak tersebut dianggap sebagai “musuh bebuyutan para misionaris dan pemerintah Belanda.”<sup>3</sup> Pada tahun yang sama Silindung menjadi bagian dari Hindia Belanda.

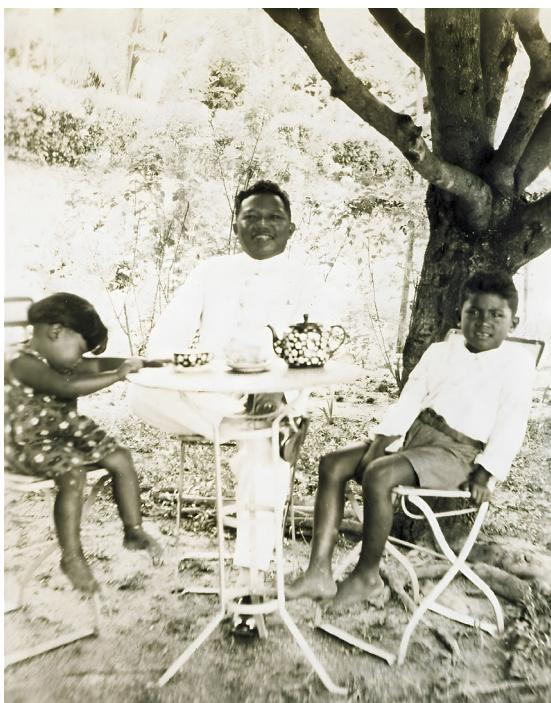
Pembangunan infrastruktur mulai meningkatkan perekonomian Silindung, terutama setelah tahun 1916, ketika jalan yang menghubungkan Tarutung dengan Sibolga di pantai barat dan Medan di pantai timur selesai dibangun. Meski demikian, penduduk sering mengeluhkan kebijakan kolonial, khususnya terkait kerja paksa (rodi) dan pajak tinggi yang membebani rakyat.

Bagian utara tanah Batak, termasuk daerah Toba, Humbang, Uluau, dan Samosir baru dimasukkan ke dalam Hindia Belanda antara tahun 1883 dan 1907. Berbeda dengan Silindung, penduduk di wilayah ini lebih cenderung menolak Belanda, antara lain karena pengaruh Singamangaraja masih sangat kuat hingga ia terbunuh pada sebuah ekspedisi militer di tahun 1907. Bahkan setelah ia gugur, pihak berwenang terus memantau para pengikutnya karena khawatir akan munculnya perlawanan baru.

Belanda memerintah tanah Batak hanya dengan beberapa pejabat Belanda yang mengawasi pegawai sipil pribumi yang direkrut dari kaum elite tradisional. Para raja Batak, yang awalnya hanya berstatus *primus inter pares* (yang pertama di antara sederajat), memperoleh status dan pengaruh lebih besar setelah diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Kelas baru yang berpendidikan Belanda dan yang sebagian besar beragama Kristen itu cenderung menolak gagasan Indonesia merdeka, terutama jika pusat

---

3) “Todfeind der holländischen Regierung und der Mission” (Jahresbericht 1907:46).



**Figur 2.** Iskander Tampoebolon dengan putri Kartini dan putra Tigor di Ambarita, sekitar 1935

pemerintahan berada di pulau Jawa. Sebaliknya, mereka lebih mendukung pembentukan negara federal di bawah naungan Belanda.

Iskander Tampoebolon, ayah Hakim, lahir pada 16 November 1893 di Sait ni Huta (Humbang Hasundutan) sebagai seorang Kristen dan berjemaat di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Ia menikah dengan Namora Siregar, yang lahir pada tahun 1895 di Bungabondar (Sipirok).

Wilayah Sipirok memiliki sejarah keagamaan yang kompleks. Sekitar tahun 1818, selama Perang Padri, penduduk Sipirok dipaksa memeluk Islam. Namun, sejak tahun 1857, misionaris dari Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) asal Jerman mulai menyebarkan agama Kristen di sana. Setelah wilayah tersebut menjadi bagian dari Hindia Belanda pada tahun 1847, Belanda sering mengangkat raja beragama Islam sebagai pegawai pemerintah. Beberapa dari mereka kemudian beralih ke agama Kristen.

Iskander Tampubolon menjabat sebagai Demang (kepala daerah) di berbagai wilayah di Karesidenan Tapanuli. Sekitar tahun 1930, ia menjadi Demang di Tarutung, dan selanjutnya bertugas di sejumlah tempat di sekitar Danau Toba, termasuk Ambarita, Lumbanjulu, Pangururan, dan Siborongborong (*De Sumatra Post* 27-02-1937; 21-03-1940). Ia juga menerbitkan sebuah buku tentang adat Batak mendirikan kampung baru (Tampoebolon 1935). Kegiatan Iskander selama Perang Dunia II, ketika Hindia Belanda diduduki oleh Jepang, tidak diketahui. Namun, Hakim Jr. mendengar dari kerabatnya di Indonesia bahwa kakeknya sempat ditahan di Pematang Siantar.

## Negara Tapanuli yang Tak Pernah Terwujud

Kurun waktu 1945–49 merupakan masa transisi ketika Belanda berupaya untuk membentuk negara-negara federal di Indonesia. Kaum elite lokal, termasuk Iskander Tampubolon, menyambut gagasan ini dengan antusias, memandangnya sebagai peluang untuk mendirikan Negara Tapanuli sebagai bagian dari Federasi Sumatera (Suprayitno 2011:84).<sup>4</sup>

Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, pasukan Sekutu mendarat di Belawan, pelabuhan Medan, pada 9 Oktober 1945, dengan tujuan mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Hal ini memicu pertempuran sengit antara kaum nasionalis Indonesia dan pasukan Belanda, yang kemudian dikenal sebagai “Pertempuran Medan Area” dan berlangsung selama enam bulan.

Pada 3 Maret 1946, revolusi sosial meletus di Sumatera Timur, menggulingkan kesultanan Melayu dan menyebabkan pembunuhan massal terhadap anggota keluarga bangsawan oleh kelompok yang mengaku sebagai nasionalis. Pada April 1946, Sekutu berhasil menduduki Medan, memaksa pasukan nasionalis mundur ke Pematang Siantar.

Pada Juni 1946, Komite Batak (Batak-comité) di Medan mengirim telegram kepada Ratu Belanda Wilhelmina, mendesak agar Belanda kembali ke Tapanuli, sebagaimana dilaporkan di surat kabar *Het Daagblad* yang berbasis di Jakarta:

“Atas nama mayoritas penduduk Tapanuli yang sangat menderita akibat kekacauan dan teror, kami dengan hormat meminta bantuan Yang Mulia untuk mengakhiri penderitaan rakyat kami sehingga pembangunan negara kami, yang saat ini hancur, dapat direalisasikan melalui kerja sama erat antara Belanda dan Batak dalam cara yang benar-benar demokratis.

Sebagaimana disebutkan dalam pidato Yang Mulia pada Desember 1942, izinkan kami menyatakan keberatan serius kami terhadap bergabungnya Tapanuli ke dalam Republik Indonesia” (*Het dagblad* 25-06-1946).<sup>5</sup>

Setelah menduduki Sumatera Utara pada Juli 1947, Belanda mendirikan Negara Sumatera Timur (NST) yang bertahan hingga Agustus 1950 ketika wilayah ini bergabung dengan bekas Keresidenan Tapanuli menjadi Provinsi Sumatera Utara dalam Republik Indonesia.

Iskander Tampubolon menjadi salah seorang pelopor Negara Tapanuli yang kerap disebut sebagai ‘negara boneka Belanda’. Akibatnya, ia dimusuhi

4) Hingga kini, sangat sedikit tulisan yang membahas tentang Negara Tapanuli. Baik Reid (1979) maupun Pelzer (1978) tidak menyebutkannya sementara studi Lance Castles (1972) hanya mencakup periode hingga 1940.

5) Sebagian besar kutipan di artikel ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda.

oleh para nasionalis (Langenberg 1976:700).<sup>6</sup> Revolusi sosial dengan cepat menyebar dari pantai timur ke Tapanuli, memicu bentrokan kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata, termasuk yang berjuang untuk Indonesia merdeka, tetapi juga gerombolan liar yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi.

Pada 23 April 1946, anggota Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Tarutung, Sibolga, dan Balige menangkap 44 pejabat senior, politikus, dan perwira militer, termasuk Iskander, dengan tuduhan menjadi agen Pemerintah Sipil Hindia Belanda NICA (*Nederlandsch-Indische Civiele Administratie*).<sup>7</sup> Namun, pemberontakan ini segera ditumpas oleh pasukan pemerintah (*Het Dagblad* 23-05-1946; *Nieuwe Courant* 24-05-1946; Langenberg 1976:504; Reid 1979:257).

Pada pertengahan tahun 1948, Iskander kembali ditangkap oleh kelompok para-militer dengan tuduhan pro-Belanda, tetapi berhasil melarikan diri ke Negara Sumatera Timur. Pada Oktober 1948, ia mengajukan petisi kepada Komisaris Raja (*Commissaris van de Koning*) untuk Negara Sumatera Timur, Dr K.J. Brouwer, di Medan atas nama partai politik Persatoean Tapanoeli, meminta intervensi militer Belanda di Tapanuli dengan tujuan untuk mendirikan Negara Tapanuli. Namun, permohonan ini ditolak karena tekanan internasional untuk menghentikan konflik (Langenberg 1976:727).

Meskipun menghadapi banyak kendala, Iskander tidak menyerah. Bersama sekelompok intelektual Batak di NST, ia mendirikan Panitia Sementara Tapanoeli pada November 1948 meminta kepada Komisaris Raja agar segera mengirim pasukan Belanda ke Tapanuli untuk membentuk Daerah Istimewa Tapanoeli. Panitia tersebut juga mengakui kedaulatan Belanda atas seluruh Indonesia, dan menuntut agar semua pegawai negeri kolonial yang diberhentikan di zaman Jepang, diangkat kembali. Untuk mendukung gagasan tersebut, Iskander mengadakan pertemuan dengan ratusan simpatisan federasi di Padang Sidempuan, Sibolga, dan Tarutung (Langenberg 1976:729).

Meskipun berusaha semaksimal mungkin, upayanya untuk mendirikan Negara Tapanuli terbukti sia-sia. Atas tekanan internasional pada akhir tahun 1949, Belanda terpaksa melepaskan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang kemudian digantikan oleh Republik Indonesia. Hanya beberapa tahun kemudian, pada Januari 1953, Iskander meninggal dunia dan dimakamkan di Tarutung.

Pengaruh Iskander yang berpandangan pro-Belanda terhadap kehidupan putranya, Hakim, tampak sangat kuat. Hal itu terlihat jelas dari surat-menurut yang terjalin antara ayah dan anak tersebut selama Hakim

6) Van Langenberg menulis namanya Iskandar Tampubolon, dan keliru menganggapnya sebagai Batak Islam.

7) NICA adalah sebuah organisasi semi-militer yang didirikan pada bulan April 1944 untuk memulihkan administrasi sipil dan hukum pemerintahan kolonial Belanda.

berada di Belanda. Pada paruh pertama tahun 1949, Hakim berkunjung ke Tapanuli untuk bertemu dengan ayahnya, dan sebelum pulang ke Belanda, ia singgah sesaat di Jakarta. Di situ ia menawarkan jasanya kepada pemerintah kolonial Belanda untuk berperan sebagai “perantara” antara pihak federalis dan pihak republik, dan meminta agar pemerintah kolonial memberikan kedudukan yang layak kepada ayahnya.

### 1936–1950: Bermukim di Belanda



Figur 3. Hakim Tampoebolon sekitar tahun 1936

Hakim adalah anak sulung sembilan bersaudara dalam keluarga Iskander Tampubolon. Ia memiliki dua adik laki-laki, Albert Halomoan dan Uluan (dikenal sebagai “Toga”), serta enam adik perempuan: Tinursani, Abisma Rekin, Sitimaur, Nurmala Samsu, Nelly, dan Kartini. Keluarga Tampubolon merupakan anggota gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Saat lahir, Hakim diberi nama Radja Hakim Tampoebolon, tetapi kemudian dia menambahkan *marga* sebelum marganya, Tampubolon, dan juga memberi dirinya nama tengah Abinari.

Hakim bersekolah di sekolah memengah (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs – MULO) Kristen, di Tarutung. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Hogere Burgerschool (HBS) Bandung dari tahun 1931 hingga Juni 1936. Baik MULO maupun HBS merupakan sekolah berbahasa Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, Tionghoa, dan elite pribumi. Pada bulan Agustus 1936, Hakim naik kapal uap Suwa Maru menuju ke Belanda.

Harthoorn (2024a) menduga bahwa Hakim dikirim ke Belanda bukan semata untuk kuliah, melainkan sebagai mata-mata Belanda: “Skenario berikut tampaknya yang paling masuk akal: Tampubolon direkrut di Indonesia oleh dinas rahasia untuk memantau masyarakat Indonesia yang berhaluan nasionalis atau komunis di kota Den Haag. Untuk mengelabui tujuan sesungguhnya, ia menyatakan berangkat ke Belanda untuk menempuh pendidikan.”

Harthoorn meragukan apakah Tampubolon benar-benar kuliah di Leiden, karena langsung pindah ke Den Haag, sebuah kota yang dikenal

dengan populasi asal Indonesia yang ramai. Tampubolon juga memilih tempat tinggal yang letaknya kurang cocok untuk bolak-balik ke Leiden naik trem atau kereta api. Bahkan anaknya, Hakim Jr., meragukan cerita bahwa ayahnya tamat kuliah (komunikasi pribadi 20-11-2023).

Konfirmasi dari Universitas Leiden menyatakan bahwa Hakim tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa (komunikasi pribadi 28-11-2023). Ternyata, Hakim bahkan tidak memenuhi syarat akademik untuk masuk universitas. Ketika mendaftar di Academie voor Beeldende Kunsten s'Gravenhage pada tahun 1940, catatan pendidikannya menyebutkan bahwa ia hanya “menyelesaikan tahun ke-5 HBS [SMA], tanpa ijazah.”

Hakim mendaftarkan dirinya sebagai penduduk Den Haag pada 10 Maret 1937.<sup>8</sup> Awalnya dia menetap di Elsstraat 10, dan setelah enam bulan ia pindah ke Galileistraat 145. Enam bulan kemudian, ia pindah ke rumah nomor 98 di jalan yang sama. Akhirnya, Hakim menetap di Van Swietenstraat 102, yang menjadi alamatnya selama Perang Dunia II.

### **Hubungan dengan Petronella Brinckmann dan Alida van Soolingen**

Menurut putranya, Hakim Jr., kemungkinan besar Tampoebolon bertemu dengan Petronella Johanna Hendrika (“Nettie”) Brinckmann (20 Juli 1910–16 Agustus 1995), seorang tukang jahit, pada musim dingin tahun 1936, ketika keduanya tinggal di Den Haag. Selama Perang Dunia Kedua mereka hidup bersama, dan pada 7 Februari 1946 Brinckmann melahirkan satu-satunya anak Tampoebolon. Meskipun pasangan tersebut tidak pernah menikah, sebuah surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua orang tua pada 19 Februari 1946 memungkinkan “Yang Mulia, Radja Hakim Abinari Tampoebolon, mahasiswa hukum” menyatakan diri sebagai orang tua sah sehingga Hakim Jr. memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Pada sekitar tahun 1938 atau 1939, Hakim Tampubolon mulai menjalin hubungan profesional dengan Johannes Hubertus van Soolingen (9 Juni 1886–7 Juni 1959), seorang mantan perwira angkatan darat Hindia Belanda.<sup>9</sup> Hakim, yang saat itu bekerja sebagai informan polisi untuk memata-matai masyarakat Indonesia yang pro-kemerdekaan seperti anggota *Perhimpunan Indonesia*, sering bertemu dengan Van Soolingen. Hakim berkenalan dengan putrinya, Alida (lahir di Den Haag, 15 April 1922 – meninggal di Parapat, 15 Mei 1955), yang kemudian menjadi pasangannya.

Menurut Rudi Harthoorn, Hakim menikah dengan Alida pada tahun

8) <https://www.wiewaswie.nl/en/detail/107140293>

9) Menurut Harthoorn, Hakim and Alida sudah berkenalan sejak 1938, tetapi menurut Hakim Jr., mereka baru berkenalan “pada awal perang” (*Verhalen over vaders vrouw Alida van Soolingen*; <https://www.nporadio5.nl/nieuws/adres-onbekend/57b31ff3-65d6-4323-865a-d2142d3dc080/verhalen-over-vaders-nieuwe-vrouw-alida-van-soolingen>; dibaca 16-07-2024).

1947, satu tahun setelah Petronella melahirkan Hakim Jr. Namun, hal ini tidak dapat dibenarkan, mengingat akta pernikahan di Belanda dapat diakses publik setelah 75 tahun. Karena hingga sekarang (2025) belum keluar akta kelahiran, maka besar kemungkinan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah dilangsungkan secara resmi. Demikian juga keterangan yang diterima Hakim Jr. dari seorang sepupu (komunikasi pribadi, 20-11-2023).

Tampaknya Hakim menjalin hubungan intim dengan Petronella dan Alida secara bersamaan selama beberapa tahun, dan keduanya saling mengenal. Dalam salah satu surat yang ditulisnya kepada Petronella pada masa perang, Hakim menyatakan bahwa ia belum dapat memilih antara kedua pacarnya (komunikasi pribadi Hakim Jr., 22-07-2024). Pada Mei 1947, Alida menulis surat kepada Petronella dengan menggunakan alat tulis dari restoran Sumatra milik Hakim, menyampaikan bahwa ia tidak lagi menginginkan berhubungan dengan Petronella.

### Kerja Sama dengan J.H. van Sooijen

Selama perang, Tampubolon bekerja sama dengan mertuanya yang menjadi agen rahasia yang memata-matai dan melaporkan komunis kepada dinas rahasia polisi Den Haag. Van Sooijen, yang selama pendudukan Jerman di Belanda dari tahun 1940 hingga 1945 berkolaborasi dengan Reichskommissariat, administrasi sipil Jerman, dan khususnya dinas rahasia, SD,<sup>10</sup> bertanggung jawab atas pengkhianatan yang menyebabkan kematian sejumlah komunis yang melawan rezim Nazi.

Pada November 1947, van Sooijen dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tindakannya, yang disebut sebagai “pengkhianatan seperti yang dilakukan Yudas” (*De Volkskrant* 11-11-1947). Harthoorn (2015:205) memperkirakan van Sooijen mungkin bertanggung jawab atas kematian lebih dari seratus orang komunis.

Saat perkara van Sooijen disidangkan, Hakim Tampubolon tampil sebagai saksi pembela. Dalam surat yang ia tanda tangani sebagai “Yang Mulia Raja”, Hakim menyatakan bahwa meskipun van Sooijen mengetahui keterlibatan Hakim dalam gerakan perlawanan komunis, dan bahwa ia mengedarkan surat kabar komunis ilegal *De Waarheid*, van Sooijen tidak pernah mengkhianatinya maupun rekan-rekan seperjuangan. Pernyataan ini dibuat saat Hakim sendiri sedang bekerja untuk Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland (SOAN)<sup>11</sup> – sebuah dinas rahasia swasta yang

---

10) Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS – Badan intelijen dari SS dan Partai Nazi NSDAP.

11) “Yayasan Pelatihan Tenaga Kerja Belanda” adalah dinas rahasia anti-komunis swasta yang beroperasi antara tahun 1947 hingga 1950 yang membiayai dirinya terutama melalui penyelundupan internasional, pemerasan, dan perdagangan berkas intelijen. Yayasan ini awalnya didanai oleh Dirk Uipko Stikker, direktur pabrik bir Heineken, yang menyediakan modal awal sebesar 100.000 gulden. Yayasan ini bekerja sama dengan oknum

bertujuan untuk melenyapkan komunisme dari bumi Belanda (Harthoorn 2011:112).

Menurut Petronella Brinckmann, Johannes Hubertus van Soolingen adalah seorang simpatisan Gerakan Sosialis Nasional di Belanda (Nationale-Socialistische Beweging – NSB)—gerakan fasis yang didirikan pada tahun 1931. Meskipun Hakim tidak pernah mengakuinya, ada kemungkinan besar bahwa pandangan politiknya juga bersayap kanan, namun Hakim terutama seorang oportunist yang mengambil kesempatan demi keuntungan pribadi, tanpa memedulikan prinsip, nilai, atau kesetiaan.

### Aktivitas Gelap Sang Pangeran

Hakim bukanlah penjahat biasa. Meskipun terlibat dalam spionase dan berbagai kegiatan ilegal, ia juga seorang pecinta seni yang memiliki minat intelektual. Pada tahun 1940–1941, ia mengikuti kelas malam seni rupa di Academie voor Beeldende Kunsten s'Gravenhage. Pada tahun 1942, ia menjadi anggota KITLV<sup>12</sup> (Notulen 1943), dan pada tahun 1944, Tampubolon menerbitkan sebuah artikel sejarah sepanjang 23 halaman tentang hari-hari terakhir Singamangaraja (Tampoebolon 1944). Pada tahun 1945, ia juga menyumbangkan buku kepada Indisch Instituut di Amsterdam (Jaarverslag 1945).

Rudi Harthoorn, peneliti perlawanan komunis selama pendudukan Jerman di Den Haag, mengungkap sisi gelap aktivitas Hakim Tampubolon, yang melibatkan spionase, kolaborasi rahasia, dan berbagai aktivitas kriminal:

“Karena tindakannya maka nyawa beberapa orang Indonesia melayang. Setelah perang, ia terlibat di dalam SOAN untuk memata-matai kaum komunis. Ia terlibat dalam rencana pembunuhan anggota delegasi Indonesia [yang menghadiri Konferensi Meja Bundar], berupaya melakukan kudeta, dan terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Selama perang, ia mengumpulkan harta dengan berdagang di pasar gelap, dan ia juga terlibat dalam pembunuhan Friedrich Schallenberg” (Harthoorn 2024b).

Seperti mertuanya, Johannes van Soolingen, Hakim bekerja sebagai informan polisi dengan cara menyusup ke dalam organisasi terlarang dengan berpura-pura menjadi pendukung. Setelah mendapatkan kepercayaan, ia melaporkan informasi yang dikumpulkannya kepada polisi dan menerima bayaran dari dinas rahasia. Harthoorn menyebut Johannes van Soolingen, Willem van

---

di kepolisian, pengadilan, dan dinas rahasia militer. Anggotanya direkrut dari mantan anggota SS (organisasi militer Nazi), serta tokoh dunia kriminal.

12) Koninklijke Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (Lembaga Ilmu Bahasa, Geografi, Budaya dan Antropologi Kerajaan Belanda) adalah sebuah lembaga ilmiah yang didirikan pada tahun 1851 yang bergerak di bidang antropologi, ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu sejarah.

Duivenboden, dan Hakim Tampubolon sebagai mata-mata yang paling berpengaruh di Den Haag. Departemen kepolisian Den Haag sudah mulai menyusup ke Partai Komunis dan organisasi terkait pada tahun 1928, dan pada tahun 1935, terjalin kerja sama antara Josef van Schaik, Menteri Kehakiman Belanda, dengan Reichssicherheitshauptamt—dinas rahasia rezim Nazi.

Menurut laporan dinas rahasia Belanda BVD, selama Tampoebolon bermukim di Belanda, ia juga menjalin “hubungan yang sangat erat” dengan Ton Wolf, yang terkenal karena kegiatan ilegalnya, dan yang juga terlibat dalam pembunuhan Schallenberg.<sup>13</sup>

Pada Mei 1940, Jerman menduduki Belanda sehingga pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan terpaksa pindah ke London. Menurut Hakim Jr., baik ayah maupun ibunya aktif dalam perlawanan anti Jerman:

“Ibuku nyaris ditahan di hotel Oranje yang terkenal di Scheveningen setelah rumahnya digeledah. Untungnya, lembaran ketikan yang hendak disebarluaskan atas nama gerakan bawah tanah melawan Nazi tidak ditemukan karena disembunyikan di bawah karpet di dekat perapian, tetapi polisi SS yang menggeledah rumah tidak menemukannya. Ayahku membantu pejuang perlawanan” (Tampoebolon Jr. t.t.).

Namun, Harthoorn (2015:431) meragukan kebenaran kisah ini. Hakim tinggal bersama Petronella di Weimarstraat 30 selama pendudukan Jerman—menurut Hakim mereka bersembunyi di sana. Pada musim panas 1943, rumah itu digeledah oleh polisi Gerrit Loor dan Cornelis Heijnis dari Documentatiedienst (dinas rahasia), tetapi Petronella dan Hakim kebetulan tidak ada di rumah. Menurut pernyataan pasca perang yang dibuat oleh Hakim, ada tumpukan surat kabar *Vrij Nederland*, *Trouw*, dan *De Waarheid* di bawah karpet.

Saat melakukan penggeledahan rumah, petugas polisi biasanya menemukan surat kabar tersembunyi, terutama jika jumlahnya banyak. Juga aneh bahwa surat kabar yang ditemukan diterbitkan oleh organisasi yang berlainan haluan. Lebih aneh lagi bahwa setelah perang Tampubolon justru terlibat dengan organisasi sayap kanan ekstrem SOAN, dan berkenalan dengan Ton Wolf, yang menjelang akhir perang terlibat dalam berbagai pembunuhan. Juga tidak masuk akal bila seseorang yang menyebarkan surat kabar komunis kemudian bergabung dengan organisasi yang setelah perang merencanakan pembunuhan terhadap kelompok kiri, terutama komunis (Harthoorn 2011:377).

Memang aneh jika Tampubolon menyebarkan baik surat kabar *Trouw* yang ortodoks-protestan maupun koran komunis *De Waarheid*. Menurut

---

13) Nationaal Archief No. 24125 Tampuolon, H.A.M. [sic!] 1946–1957, Inventaris van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en voorgangers. Versie: 26-03-24.

Harthoorn (2015:432), penggeledahan rumah itu hanya dibuat-buat untuk menimbulkan kesan bagi masyarakat sekitar seolah-olah Tampubolon adalah anggota perlawanan anti Nazi.

Menariknya, selama Hakim ‘bersembunyi’ dengan Petronella di Weimarstraat 30, Jimmy den Held, saudara ipar pengkhianat terbesar di Belanda, Antonius van der Waals, menetap di alamat yang sama. Jimmy berdagang di pasar gelap sambil bekerja sama dengan badan intelijen Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (SD). Jimmy juga menuap petugas SD agar mereka membebaskan pedagang pasar gelap yang ditahan SD. Skema korupsi tersebut sangat menguntungkan (Harthoorn 2024a).

Dengan berpura-pura menjadi seorang pangeran, Hakim berhasil menyusup ke kalangan atas Belanda. Pada April 1942, “Raden H.A. Tampubolon” menghadiri pemakaman Herman Adriaan van Karnebeek di Den Haag, seorang politikus konservatif yang pro-Jerman, mantan menteri, dan wali kota Den Haag, yang dari 1928 hingga 1942 menjabat sebagai kepala provinsi Holland Selatan (*Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad* 02-04-1942).

### **Sang Pangeran Dideportasi ke Jerman**

Saat Jerman menduduki Belanda, sekitar setengah juta warga Belanda secara paksa diberangkatkan ke Jerman untuk bekerja di perusahaan yang penting bagi upaya perang. Dalam memoarnya, Hakim Jr. menceritakan pengalaman ayahnya:

“Pada tahun 1944, ayahku dideportasi paksa oleh pemerintah pendudukan Jerman sebagai bagian dari ‘Arbeitseinsatz’ [penempatan tenaga kerja] untuk bekerja di industri perang di Jerman. Namun, ia berhasil meyakinkan polisi perbatasan di Bocholt, dekat Arnhem di perbatasan Belanda, alangkah tidak bijaksananya bila ia dideportasi. Di sekitar Danau Toba, katanya, banyak misionaris Jerman dari RMG. Jika terjadi sesuatu padanya, ia tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada tindakan pembalasan terhadap para misionaris tersebut. Ia juga mengemukakan bahwa ia seorang bangsawan dari Indonesia (Raja). Tampaknya hal itu mengesankan bagi petugas Jerman yang kemudian mengizinkan ‘sang pangeran Sumatra’ kembali ke Den Haag dengan kelompok pengikutnya yang berjumlah tujuh orang. Ketujuh orang ini semuanya keturunan Indonesia, dan beberapa di antaranya juga aktif dalam perlawanan” (Tampoebolon Jr. t.t.).

Harthoorn (2024b) mempertanyakan apakah Hakim memang secara paksa dideportasi oleh pihak Jerman. Pada September 1944, Sekutu melancarkan serangan dari perbatasan Belanda-Belgia melintasi bagian selatan Belanda. Pada hari Selasa, 5 September 1944, perayaan besar-besaran

berlangsung di antara orang Belanda, karena adanya laporan palsu bahwa Breda sudah dibebaskan oleh pasukan Sekutu. Pada hari itu, yang menjadi terkenal sebagai *Dolle Dinsdag* (“Selasa Gila”), banyak orang Jerman, tetapi juga orang Belanda yang berkolaborasi dengan Jerman, melarikan diri ke wilayah timur Belanda atau ke Jerman karena takut akan tindakan pembalasan.

Menurut Harthoorn (2024b), Hakim mungkin melarikan diri pada hari itu bersama tujuh orang Indonesia lainnya yang, menurut asumsi Harthoorn, “sepaham dengannya”, artinya kolaborator juga. Pada Desember 1944 rombongan tersebut diberi izin untuk kembali ke Den Haag.

“Sdr. Marga Tampoebolon, Radja Hakim Abinari, Pangeran dari Sumatra, lahir 18-10-14 di Siborongborong di Sumatra (Hindia Belanda), dengan tempat tinggal sementara di Den Haag, van Swietenstr. 102, setelah pemeriksaan terhadap keadaannya, diberi izin untuk kembali ke Den Haag dengan rombongannya yang terdiri dari tujuh orang.”<sup>14</sup>

Namun, sebagaimana terlihat dari surat yang dimiliki oleh Hakim Jr., maka ayahnya ternyata tidak melarikan diri ke Jerman, tetapi memang dideportasi paksa:

“Radja Hakim Abinari marga Tampoebolon, lahir 28 Oktober 1914 di Siborongborong, KTP No. G 41/00824, bertempat tinggal di Den Haag, Van Swietenstr. 102, dibebaskan dari kerja paksa. Surat izin sementara ini berlaku hingga surat izin baru akan dikeluarkan.”<sup>15</sup>

Pada 11 Januari 1945 Hakim membalas dengan mengucapkan terima kasih, dan sekalian ia mengajukan beberapa permintaan. Yang pertama dikabulkan pada 19 Januari 1945:

“Yang Mulia, Radja Hakim A. marga Tampubolon, Den Haag, van Swietenstr. 102, diizinkan untuk menggunakan sepedanya. Oleh karena itu, sepedanya tidak boleh disita.”<sup>16</sup>

Setelah tanggal 6 Oktober 1944, tentara Jerman memerintahkan pihak berwenang untuk menyita semua sepeda di Italia, Belanda, dan di Denmark sebagai tanggapan atas kelangkaan bahan bakar. Sepeda dibutuhkan sebagai sarana transportasi alternatif. Menurut Harthoorn (2024a), izin seperti itu “biasanya hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan pihak Sicherheitsdienst.”

---

14) Surat “Geheime Staatspolizei (Gestapo), Grenzkommissariat Borken”, dikeluarkan di Bocholt tanggal 7 Desember 1944 (Harthoorn 2024b).

15) Surat “Der Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete”, ditandatangani oleh Liese (Reichsleiter) tanggal 10 Desember 1944 di Apeldoorn.

16) Surat “Der Reichskommissar für die besetzten Gebiete der Niederlande”, dikeluarkan tanggal 19 Januari 1945 oleh Wehrmachtkskommandantur (markas besar tentara) Den Haag (Harthoorn 2024b).

Sehari kemudian, pada 20 Januari 1945, surat Hakim tertanggal 11 Januari dibalas sebagai berikut:

“Yang Mulia,

Surat Saudara tertanggal 11 Januari 1945 telah kami terima, dan saya ingin membalas doa yang Saudara ungkapkan di dalamnya. Saya mendoakan hal yang sama untuk Saudara dan rekan-rekan Saudara. Semoga tahun 1945 membawa kemenangan bagi Jerman sehingga semua dapat segera diselesaikan.

Sayangnya, saya tidak berwenang untuk memenuhi permintaan-permintaan yang Saudara sampaikan. Namun, saya telah mengirimkan salinan surat Saudara kepada Perwakilan Umum untuk Penempatan Tenaga Kerja, Reichsamtseiter Liese, dan kepada Pemimpin SS sekaligus Polisi Tertinggi di Apeldoorn. Saya telah meminta kepada mereka keduanya untuk mengambil tindakan lebih lanjut di departemen mereka masing-masing dan menghubungi Saudara secara langsung. Selain itu, saya juga telah menulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kolonial Belanda, Tuan Six, terkait perawatan dan bantuan keuangan bagi para pangeran, mahasiswa, dan pihak-pihak lain, yang tinggal di Belanda.

Semoga langkah-langkah yang tersebut di atas dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Hormat saya, [tanda tangan].”<sup>17</sup>

## Setelah Perang

Setelah Perang Dunia II, Hakim Tampubolon mengajukan permintaan ganti rugi kepada *Schade Enquête Commissie*.<sup>18</sup> Menurutnya seperangkat pakaian kebesaran yang dihiasi dengan berlian dan batu delima disita saat pendudukan Jerman (Harthoorn 2015:432). Sudah barang tentu “Sang Mulia” mengada-ada, karena raja Batak biasanya mengenakan pakaian yang serupa dengan masyarakat umum, dan tidak memiliki ‘pakaian kebesaran’.<sup>19</sup>

Antara tahun 1946 dan 1947 badan intelijen swasta anti-komunis Hacke-Elsinga didirikan dengan Pierre Sweerts sebagai ketua dan Tampubolon sebagai salah seorang anggota terpenting (Harthoorn 2015:449–50). Anggotanya menerima gaji bulanan sebesar 500–600 Gulden—sekitar tiga kali lipat upah seorang buruh pada masa itu (Harthoorn 2024b). Hacke-Elsinga terutama merekrut bekas pedagang pasar gelap, kolaborator—termasuk polisi yang

17) Surat No. 1097 “Der Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete. Der Vertreter des Auswärtigen Amtes” tertanggal 20 Januari 1945 di Apeldoorn.

18) Komisi Penyelidikan Kerugian adalah lembaga pemerintah untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian selama Perang Dunia Kedua. Lebih dari setengah juta orang mengajukan permohonan. Komite tersebut berusaha membenarkan setiap permohonan dan kemudian menentukan jumlah kompensasi.

19) Berlian (intan) dan batu delima tidak pernah digunakan dalam perhiasan tradisional Batak (komunikasi pribadi Achim Sibeth 28-06-24).

dipecat setelah perang karena berkolaborasi dengan Jerman—and bekas anggota pasukan tempur yang melakukan perampokan untuk memperkaya diri. Ketuanya Pierre Sweerts adalah seorang mantan anggota SS<sup>20</sup> Belgia, yang, antara lain, membantu penjahat perang Raymond Westerling untuk melarikan diri dari pihak berwenang Indonesia yang mencarinya. Tidak lama kemudian, Hacke-Elsinga berkembang menjadi dinas rahasia swasta SOAN (Graaff & Wiebes 1992:15–21; Harthoorn 2015:441; 451–462).

Sambil bekerja untuk Hacke-Elsinga, Hakim membuka restoran Melati di Thomsonlaan 51, Den Haag dengan “Koperasi Setia” sebagai pemilik (De Nieuwe Nederlander, 11 Januari 1947; Het Binnenhof, 30 Januari 1948). Usaha tersebut tidak bertahan lama. Pada 19 Agustus 1948, surat kabar Het Binnenhof memasang iklan bahwa Restoran Melati telah dibuka kembali di lokasi baru, tetapi di bawah kepemimpinan “Koperasi Setia”, tetapi tanpa menyebut nama Hakim.

Sementara itu, pada Desember 1947, Hakim sudah mendirikan sebuah restoran Indonesia lainnya. Dalam memoarnya, Tampoebolon Jr. (t.t.) menulis:

“Setelah Perang Dunia Kedua, ayah dan ibuku tetap tinggal bersama. Karena ayahku tidak lagi menerima bantuan keuangan dari ayahnya karena keadaan politik di Indonesia yang kacau, misalnya proklamasi kemerdekaan dan aksi polisi Belanda, ayah harus mencari nafkah dengan membuka rumah makan ‘Sumatra’ di Rijswijkseplein 22 di Den Haag pada 27 Desember 1947. Namun, usaha restoran tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga setelah beberapa tahun ditutup lagi.”

Pembukaan restoran Hakim diiklankan di surat kabar Katolik *Het Binnenhof* (24-12-1947), dan menariknya, juga diiklankan di surat kabar komunis *De Waarheid* (21-02-1948). Surat kabar *Het Dagblad* (02-01-1948) menerbitkan artikel singkat yang menyatakan bahwa “restoran yang dikelola oleh Radja H.A. Tampoebolon [...] tidak memiliki tujuan komersial, tetapi semata-mata untuk menyediakan tempat pertemuan mendukung kerja sama timbal balik antara masyarakat Indonesia.”



Figur 4. Hakim, Petronella, dan Hakim Jr. di Den Haag tahun 1947

20) Schutzstaffel (Skuadron Pelindung), organisasi keamanan dan militer rezim Nazi.



Figur 5. De  
Waarheid 21-  
02-1948

Harthoorn (2015:432) yakin bahwa tujuan sesungguhnya pembukaan rumah makan tersebut untuk memata-matai para tamu, terutama mereka yang berhaluan komunis, dan mengumpulkan informasi dengan bergaul bersama mereka. Restoran itu juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan makan anggota Hacke-Elsinga. Harthoorn lebih lanjut berpendapat bahwa keuangan restoran tersebut tidak sepenuhnya berasal dari Tampubolon sendiri. Ia menduga bahwa Tampubolon “mungkin menerima dukungan keuangan untuk restorannya yang terus merugi dari SOAN atau dinas intelijen lainnya” (Harthoorn 2024b; cf. Botman 2019:204).

### Pembunuhan Schallenberg

Tampubolon juga terlibat dalam pembunuhan Friedrich Schallenberg, seorang pengecer barang olahraga asal Jerman yang memiliki sejarah panjang dalam berbagai aktivitas ilegal di Belanda. Pada September 1949, jasad Schallenberg ditemukan di sebuah kolam dangkal dengan kedalaman 30 cm di Den Haag. Polisi berusaha menutupi insiden tersebut dengan menyebutnya sebagai kasus bunuh diri—kemungkinan karena adanya keterlibatan secara tidak langsung dari dinas rahasia Belanda dalam peristiwa itu (Harthoorn 2015:469).

Sekitar tahun 1948, Schallenberg terlibat dalam perselisihan dengan dua anggota SOAN terkait pembagian saham curian senilai 50.000 Gulden.<sup>21</sup> Ia dibunuh setelah menghadiri pertemuan di rumah Gerrit Dumont di Groot

21) Sebagian saham dimiliki oleh orang Yahudi yang dibunuh di masa perang. Sebelum dideportasi, mereka menyerahkan sahamnya kepada kenalan dengan harapan akan mendapatkannya kembali seusai perang. Namun, sahamnya tidak dikembalikan dan karena nomor seri tercatat maka saham tersebut tidak dapat diperdagangkan di Belanda secara legal. Akibatnya, saham-saham tersebut diselundupkan ke Amerika Serikat atau Kanada untuk dijual di bursa saham di sana. Selain itu, ada saham yang dicuri dari brankas bank yang rusak selama pengeboman dan operasi militer (komunikasi pribadi Harthoorn 08-07-24).

Hertoginnelaan 26 dengan beberapa anggota dinas rahasia swasta SOAN, termasuk Hakim Tampubolon.

Siapa di antara para hadirin yang membunuh Schallenberg tidak diketahui, tetapi menurut Harthoorn tersangka utama adalah “Pierre Sweerts, Radja Tampoebolon, Gerrit Dumont dan Beb Bakhuijs” yang semuanya anggota SOAN (Harthoorn 2024b). Menurut Harthoorn, Tampubolon terlibat entah secara langsung atau tidak langsung (Harthoorn komunikasi pribadi 07-08-2024; cf. Botman 2019: 228).

Selain saham curian, salah satu motif lainnya yang melatarbelakangi pembunuhan Schallenberg berhubungan dengan perdagangan senjata yang dilakukan oleh orang yang terkait dengan Pierre Sweerts, termasuk perwira militer Belanda Raymond Westerling yang tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai perwira militer yang paling kejam karena pembantaian yang dilakukannya. Sweerts dikenal sebagai penyelundup senjata dengan kontak global di dalam berbagai dinas intelijen, militer, dan sektor bisnis. Westerling dan Sweerts diketahui telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun. Kerja sama mereka, antara lain, bertujuan untuk mencegah kemerdekaan Indonesia dan untuk menggulingkan pemerintah Indonesia.<sup>22</sup> Namun, tidak diketahui apakah, atau sejauh mana, Tampubolon terlibat dalam upaya ini.

### Rencana Pembunuhan Delegasi Konferensi Meja Bundar

Setelah Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menuntut agar aksi militer Belanda terhadap Indonesia segera dihentikan, Belanda dan Indonesia sepakat untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus hingga 2 November 1949) untuk mempersiapkan penyerahan kedaulatan.

Organisasi sayap kanan yang menentang kemerdekaan Indonesia seperti Nationaal Réveil,<sup>23</sup> Nationaal Comité tot Handhaving der Rijkseenheid,<sup>24</sup> dan SOAN berusaha untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Kedua pemimpin Nationaal Réveil, C.L. Scheuer dan M.R. Loze, merencanakan serangkaian tindakan drastis, termasuk menyerang atau menculik Perdana Menteri Willem Drees dan Menteri Urusan Kolonial J.H. van Marseveen.<sup>25</sup>

---

22) Sweerts juga terlibat dalam rencana untuk memicu pemberontakan di Ambon. Dengan menggunakan berbagai alias, Sweerts beroperasi di Belgia dan Inggris untuk membeli senjata, pesawat Lockheed, dan berbagai pemancar radio. Barang-barang ini akan disimpan di ibu kota Belgia, Brussel, dengan biaya yang ditanggung oleh Republik Maluku Selatan (RMS). Pemerintah Maluku di pengasingan mengeluarkan paspor diplomatik kepada Sweerts sebagai Sekretaris Negara RMS untuk Urusan Perang dan Urusan Umum dengan nama Pierre Aumena. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesan seolah-olah misi luar negerinya, sebagai wakil RMS, sah (Botman 2019).

23) “Pembangkitan Nasional” adalah organisasi ultra nasionalis dan semi-fasis.

24) “Panitia Nasional untuk Mempertahankan Kesatuan Kerajaan” (1946–1949) adalah organisasi yang menentang kemerdekaan Indonesia.

25) Laporan koordinator dinas intelijen dan keamanan (Coördinator der

Ketiga organisasi tersebut juga berencana untuk membunuh anggota delegasi Konferensi Meja Bundar, terutama Mohammad Hatta. Menurut laporan dinas rahasia Belanda (BVD), Tampubolon dipilih untuk menyediakan racun untuk tujuan tersebut.<sup>26</sup>

Namun, akhirnya rencana pembunuhan dibatalkan karena SOAN menyadari bahwa tindakan tersebut justru akan semakin merugikan posisi Belanda di mata dunia internasional.

Beberapa orang yang terlibat dalam upaya pembunuhan tersebut ditahan. Merasa terancam, Hakim memutuskan untuk meninggalkan Belanda (Harthoorn 2015:452–3). Setelah 14 tahun menetap di Belanda, ia pulang ke tanah air yang telah berubah dari Nederlands-Indië menjadi sebuah republik yang merdeka.

### **Kembali ke Indonesia**

Kepulangan Hakim Tampubolon ke Indonesia berlangsung secara bertahap. Ia pertama kali kembali ke Indonesia pada tahun 1947, disusul kunjungan kedua pada tahun 1949 saat Sumatera masih berada di bawah kendali Belanda. Setelah perjalanan ketiga pada awal 1950, ia menetap di Indonesia secara permanen.

Dalam koleksi foto milik Hakim Jr., terdapat sebuah foto berlabel “1947–Belawan (Sumatera)” yang menunjukkan kehadirannya di pelabuhan Medan, Belawan. Sementara itu, dari foto lain berlabel “Holland 1947”, diketahui bahwaistrinya, Alida van Soolingen, tidak mendampinginya. Tidak diketahui berapa lama Hakim berada di Indonesia pada perjalanan pertama atau kegiatan apa yang ia lakukan di sana.

Perjalanan kedua berlangsung pada paruh pertama tahun 1949. Mengingat ayahnya, Iskander Tampubolon, mengagitas pembentukan Negara Tapanuli, maka dapat dipastikan bahwa Hakim turut serta dalam upaya persiapan pendirian negara tersebut sebagai bagian dari republik federal yang diharapkan berada di bawah naungan Belanda. Keberadaan Hakim di Sumatra pada saat itu diketahui dari dokumen Belanda.

Pada bulan Juni 1949, Hakim Tampubolon bertemu dengan Dr. J.J. van de Velde, penasihat politik pemerintah Belanda untuk urusan Sumatera, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa dirinya baru saja kembali dari Tapanuli dan menekankan pentingnya pembentukan Negara Tapanuli dengan prinsip “kerja sama dengan Belanda atas dasar kesetaraan dan kebebasan.” Namun, ia gagal meyakinkan van de Velde, yang tampaknya

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, CIVD), F.J. Kist, kepada Louis Einthoven, kepala dinas intelijen dan keamanan umum (Binnenlandse Veiligheidsdienst, BVD).

26) Nationaal Archief No. 24125 Tampuolon, H.A.M. [sic!] 1946–1957, Inventaris van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en voorgangers. Versie: 26-03-24. Lihat juga Graaf dan Wiebes 1992:59.

meragukan niat dan kemampuan Hakim dalam mewujudkan rencananya:

“[Tampubolon] membayangkan dirinya sebagai perantara antara kelompok republik dan federalis di Tapanuli. Dia ingin kembali ke Tapanuli dengan biaya sendiri, asalkan diberi sejumlah kemudahan untuk bisnis impor-ekspornya, terutama sebuah mobil.

Dalam laporannya, ia mengkritik T.B.A. [Administrasi Daerah] Tapanuli, terutama karena tidak mengizinkan ayahnya, Iskander Tampubolon, untuk memainkan peran yang telah ia bayangkan bagi dirinya sendiri saat ia masih berada di Medan sebelum aksi polisi kedua. Secara tersirat di dalam laporannya terdapat keluhan bahwa keluarga Tampubolon kurang dihargai.”<sup>27</sup>

Van de Velde mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peran Hakim Tampubolon dalam politik dan bisnis pada akhir 1940-an:

“Sangat berbahaya jika seseorang seperti Tampubolon diizinkan bertindak sebagai mediator politik, diberikan segala kemudahan yang ia inginkan, dan kemudian menerima imbalan atas jasanya pula.”

Dari memorandum Van de Velde diketahui bahwa pada saat itu Tampubolon belum mendirikan perusahaannya sendiri:

Saat ini dia menyebut dirinya direktur jenderal dan penasihat umum perusahaan impor Indonesia. Entah bagaimana, ia berhubungan erat dengan Jaihutan Moelia Panggabean, direktur perusahaan Poeraja [=Poerada Kongsi], yang juga anggota Majelis Pemerintahan Kota [Stadsbestuursraad] di Batavia. Keduanya aktif memperoleh jatah impor dan ekspor dari Kementerian Urusan Ekonomi.

Kemungkinan karena gagal meyakinkan pemerintah kolonial untuk menjadi mitranya maka Hakim kembali ke Belanda dan melanjutkan aktivitasnya di sana untuk menentang kemerdekaan Indonesia. Kepulangannya ke Belanda bertepatan dengan berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (23 Agustus hingga 2 November 1949).

Selama di Belanda, pada bulan Oktober 1949, ia menghadiri pemakaman Mimi dan Herman van der Vegt, pasangan pemain piano dan biola yang meninggal dalam kecelakaan pesawat di India sepulang dari Jakarta (*Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant* 28-10-1949).

Tampaknya ia tinggal di Belanda hanya selama beberapa bulan karena keterlibatannya di dalam upaya perencanaan pembunuhan anggota delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar.

---

27) *Memorandum van Van de Velde aan Dir. Kab. Batavia 18.6.1949. Nota van R. H. Tampubolon over Tapanuli.* Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeeling, Collectie P.J. Koets, No. 394.

Menurut Harthoorn (2024b), Hakim melarikan diri ke Indonesia pada tahun 1950 “karena situasi di Belanda menjadi terlalu berbahaya baginya (ia telah membuat banyak musuh dan polisi mungkin sedang mengincarnya)”.

Sejak akhir 1949 atau awal 1950, Hakim menetap di Indonesia, sementara istrinya masih berada di Belanda. Pada 6 Februari 1950, ia menulis surat kepada adiknya, Nelly. Pada bulan Maret, ia menulis surat kepada Petronella, menjelaskan bahwa ia hanya bisa mengirim uang dalam jumlah terbatas karena kebijakan pemerintah terkait valuta asing. Ia juga meminta Petronella untuk membagi uang tersebut dengan Alida, mengancam akan memutuskan kontak jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun, meskipun Petronella tidak membagikan uang tersebut dengan Alida, keduanya tetap berhubungan (komunikasi pribadi Tampoebolon Jr. 20-11-2023).

Alida akhirnya menyusul ke Indonesia pada bulan Februari 1951.<sup>28</sup> Dari album foto keluarga, terlihat Alida berada di Indonesia pada tahun 1951, 1952, dan 1953, berpose bersama saudara perempuan Hakim, Kartini, di depan Casa Bella, vila baru mereka di tepi Danau Toba, Parapat.

### Mendirikan Usaha N.V. Hasil Veem

Setelah kembali ke Indonesia, Hakim Tampubolon membawa dana dalam jumlah besar, yang diduga diperoleh dari perdagangan pasar gelap dan berbagai kegiatan lainnya, baik yang bersifat legal maupun ilegal, selama ia berada di Belanda. Dengan modal tersebut, ia mendirikan usaha di Jalan Penjalai 1, Tanjung Priok, Jakarta, yang diberi nama N.V. Hasil Veem. Perusahaan ini bergerak di bidang impor peralatan pertanian, beras, dan pasokan makanan, dengan Hakim menjabat sebagai “presiden-direktur”. Usaha ini pertama kali disebut di surat kabar berbahasa Belanda *Java-Bode* pada 17 Juli 1953.

Antara Januari 1954 dan Januari 1955, Hakim memasang 16 iklan di *Java-Bode*, memperkenalkan perusahaannya, yang diklaim “100% nasional”, sebagai agen untuk mesin pertanian yang diimpor dari Inggris dan Jerman Barat. Pada 26 Juli 1954, N.V. Hasil memasang iklan di *Java-Bode* untuk mencari gudang seluas 5000 m<sup>3</sup>.

Menurut *Het nieuwsblad voor Sumatra* (18 Mei 1955), selain N.V. Hasil, Tampubolon juga memiliki lima perusahaan lain di Jakarta.



Figur 6. Gudang N.V. Hasil di Tanjung Priok.

28) Pada tanggal 20 Februari 1951 surat kabar *De Nieuwsgier* melaporkan bahwa lima penumpang tiba di bandara Kemayoran dengan pesawat KLM dari Amsterdam. Salah satu di antaranya adalah “mej. A.M. Tampubolon”, yang kemungkinan besar adalah “Nyonya Alida Marga Tampubolon”.

## Tragedi di Parapat

Pada tahun 1954, Hakim mendirikan cabang N.V. Hasil di Medan, dengan Djomat Purba sebagai direkturnya. Djomat sebelumnya dikenal sebagai komandan Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur (NST). Cabang Medan N.V. Hasil juga mempekerjakan adik Hakim Raja Uluan, yang lebih dikenal dengan nama Toga Tampubolon (13 September 1927 – 18 Mei 1978). Sebelum bergabung dengan N.V. Hasil, Toga memiliki karier militer sebagai Mayor Jenderal di Tentara Nasional Indonesia.

Perselisihan internal di N.V. Hasil menjadi latar belakang insiden tragis di Parapat pada 15 Mei 1955. Konflik antara Toga Tampubolon, Djomat, dan Hakim Tampubolon memuncak setelah tuduhan manipulasi dan penipuan terhadap Toga mencuat. Salah satu kasusnya adalah penjualan mobil Jeep tanpa sepengertahan para direktur, sebagaimana dilaporkan oleh *Het Nieuwsblad voor Sumatra* (18-05-1955).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Hakim dan Djomat mengundang Toga ke Casa Bella, vila milik Hakim yang terletak di tepi Danau Toba di Parapat. Namun, pertemuan yang direncanakan untuk mencari solusi justru berakhir dengan tragedi berdarah. Berikut ini ringkasan artikel yang dimuat di dalam *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, tertanggal 18 Mei 1955:

“Ketika Toga tiba di vila Hakim dengan ibunya dan seorang teman, Hakim [bersama Djomat] masih berada di pasar, sementara Ny. Hakim [Alida] sibuk menyuapi dua anak Djomat. Toga langsung masuk ke rumah dan mengambil pistol dari kamar abangnya dan menembak ke arah Ny. Hakim. Dengan luka di bagian tangan, ia lari ke belakang mencari pertolongan. Toga menariknya kembali ke dalam rumah dengan paksa dan melepaskan tiga tembakan lagi. Salah satu peluru mengenai leher Ny. Hakim, menyebabkan kematian seketika. Toga langsung melaporkan diri di kantor polisi. [...]

Tampaknya, Toga sudah memberi tahu ibunya tentang niatnya untuk membunuh Ny. Hakim karena, menurutnya, dia tidak bisa menerima orang asing di dalam keluarganya. Namun, ibu Toga tidak memberitahu siapa pun.

Menurut mr. Hakim A. Tampubolon, pernikahannya dengan Alida dilangsungkan sesuai dengan adat Batak dan dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka di Tarutung. Pada kesempatan itu,istrinya juga menerima marga menjadi Boru L[umban] Tobing. Sebagai pengusaha nasional, mr. Hakim A. Tampubolon, yang ayahnya pernah jabat sebagai Demang di Tarutung, mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sukanto telah memberikan pistol yang digunakan secara tragis untuk merenggut nyawa istrinya.<sup>29</sup>

---

29) Soekanto Tjokrodiatmodjo (1908–1993) menjadi Kapolri pertama dari tahun 1945 hingga 1959.



**Figur 7.** Alida di Parapat

Selama Perang Dunia, Tn. dan Ny. Hakim menetap di Belanda. Selama perang, keduanya pernah dipenjarakan oleh Jerman karena keterlibatannya dalam gerakan perlawanan. Mr. dr. Hakim meraih gelar PhD di Belanda dan pernah menjadi dosen hukum di Universitas Leiden.

Pemakaman korban tragedi Parapat, yang berlangsung pada Senin pagi di Siantar, menarik perhatian masyarakat umum.”

Tiga surat kabar lainnya melaporkan bahwa pemakaman berlangsung di Pematang Siantar. Namun, sebuah iklan yang ditempatkan oleh N.V. Hasil di *De Nieuwsier* (20-05-1955) menyatakan bahwa “pemakaman akan diadakan di Menteng Pulo, Jakarta, pada Minggu 22 Mei 1955.” Meskipun Alida beragama Katolik, diduga bahwa ia dimakamkan di permakaman Protestan karena Hakim tidak pernah mengungkapkan agama Alida kepada keluarganya.

Ketika melaporkan kejadian di Parapat, surat kabar *Algemeen Handelsblad* (18-05-1955) bahkan menambahkan bahwa “Hakim danistrinya pernah ditangkap oleh Belanda di Indonesia karena kegiatannya mendukung Republik”. Hakim Tampubolon adalah sosok yang pandai mengarang cerita. Ia tidak pernah menjadi anggota gerakan perlawanan anti pendudukan Jerman di Belanda, apalagi pendukung kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, Hakim pernah menawarkan jasanya sebagai mata-mata kepada pemerintah kolonial Belanda di Jakarta. Lebih jauh, klaim Hakim tentang gelar dan pencapaian akademisnya juga palsu. Hakim tidak pernah menjadi *mr.* – singkatan untuk *meester in de rechten*, atau Sarjana Hukum – apalagi punya gelar doktor di bidang hukum dan menjadi dosen di Universitas Leiden. Hakim malahan tidak pernah menjalani pendidikan universitas.

Setelah pindah dari Belanda (kerajaan) ke Indonesia (republik) penggunaan gelar “Yang Mulia” tentu dianggap tidak pantas. Lagi pula ia pasti

akan ditertawakan oleh sesama orang Batak karena di dalam masyarakat Batak yang bersifat demokratis tidak dikenal sebutan “Yang Mulai”. Oleh sebab itu, maka ia menggantikan gelar kerajaan dengan gelar akademis doktor!

Baik anak Hakim dan anak Toga mengakui bahwa Alida tidak diterima dengan baik oleh keluarga Hakim. Pernyataan Hakim bahwa “pernikahannya sesuai dengan adat Batak” dan bahwa Alida telah “menerima nama baru, Boru L[umban] Tobing” ditentang oleh beberapa anggota keluarga. Menurut putra Toga, Mardohar Tampubolon (komunikasi pribadi 09-10-2024), Alida sering berselisih dengan ibu mertuanya, melarangnya mencampuri pernikahannya dan bahkan menghina mertuanya sehingga tindakan Toga dianggap sebagai pembelaan kehormatan ibunya. Anggota keluarga lainnya juga menyalahkan Alida atas gaya hidupnya yang dinilai berlebihan.

Toga dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh pengadilan negeri Pematang Siantar (*De Nieuwsgier* 13-07-1956) dan dibebaskan setelah menjalani hukuman selama delapan tahun.

### **Ekspansi Usaha dan Tahun-Tahun Terakhir Hakim Tampubolon**

Tak lama setelah kematian tragis istrinya, surat kabar *De Nieuwsgier* (21-6-1955) melaporkan bahwa N.V. Hasil telah membuka gudang baru di Tanjung Priok: “Sabtu siang, gudang seluas 1.200m<sup>2</sup> dibuka oleh Hasil Concern. Presiden-direktur R.H.A.M. Tampubolon menerima ratusan undangan. [...] Pembukaan gudang baru bertepatan dengan ulang tahun kelima Hasil Concern. Di antara para tamu undangan terdapat, antara lain, sekretaris jenderal dari kementerian komunikasi, pendidikan, dan ekonomi.”

Pada musim panas tahun 1955, Hakim melakukan perjalanan keliling dunia dengan pesawat. Hakim Jr. menduga bahwa ayahnya mungkin menjadi bagian dari delegasi perdagangan atau terlibat dalam misi diplomatik, mungkin sebagai persiapan untuk perjalanan Presiden Sukarno yang dijadwalkan antara Mei dan Juli 1956, yang mencakup kunjungan ke Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, dan Swiss. Hakim mengirim kartu pos dari berbagai kota, termasuk Oslo (06-08-1955), Stockholm (14-08), Göteborg (18-08), Kopenhagen (23-08), Hamburg (27-08), Zurich (05-09), Jenewa (08-09), dan Antwerpen (16-09). Kemudian ada perjalanan kedua dengan foto dikirim dari Roma (07-01-1956), Karachi (08-01), dan Jakarta (11-01).

Setahun kemudian, Hasil Concern terus berkembang. Pada awal April 1956, N.V. Hasil mengiklankan enam belas lowongan kerja baru di surat kabar *De Nieuwsgier* dan *Java-Bode*.

Setelah tahun 1956, Hakim Tampubolon dan perusahaannya mulai menghilang dari pemberitaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penutupan banyak surat kabar berbahasa Belanda setelah pemerintah Indonesia mengusir warga Belanda pada akhir tahun 1957. Surat



**Figur 8.** Kartu Pos kepada Hakim Jr. (Puckie)



**Figur 9.**  
Tampubolon di Gudang N.V. Hasil (kedua dari kanan)

kabar seperti *De Nieuwsgier* dan *Java-Bode*, misalnya, berhenti terbit setelah tahun tersebut.

Meskipun demikian, N.V. Hasil tampaknya masih beroperasi hingga setidaknya tahun 1972, seperti tercatat dalam direktori perdagangan. Namun, tampaknya, karena alasan yang tidak diketahui, rezeki mulai tersendat-sendat. Hakim Jr. (komunikasi pribadi 20-11-2023), menceritakan:

“Setelah itu [tahun 1956] saya kehilangan kontak dengan ayah saya untuk sementara waktu akibat komplikasi politik di Indonesia. Sekitar tahun 1957 kami bisa saling menulis surat lagi. Dia selalu baik dan kebapakan kepada saya, tanpa ada dendam terhadap ibu saya yang tetap mencintainya.

Beberapa kali ayah mencoba mengunjungi Belanda, tetapi perjalanan tersebut harus dibiayai dari sini. Ibu saya menerima tunjangan sosial, jadi dia tidak punya uang untuk membantu. Ibu sempat meminta bantuan dari teman-temannya, tapi mereka enggan meminjamkan uang.

Pada tahun 1975, ayah akhirnya kembali ke Belanda dan tinggal bersama saya dan ibu selama beberapa minggu. Ibu saya sangat gembira bertemu dengannya lagi, namun saya hanya sempat menghabiskan waktu sebentar karena harus bepergian ke Amerika Serikat untuk urusan bisnis. Setelah itu, kontak kami hanya terbatas pada surat-menjurat.

Pada tahun 1986, saya menerima surat dari saudara perempuan ayah saya, Tien [Tinoersani], yang tinggal di Jakarta. Dia memberi tahu bahwa kondisi ayah memburuk. Ayah terkena stroke yang membuat tubuhnya lumpuh sebelah. Surat-surat terakhirnya menjadi sangat tidak teratur, dan dia hampir tidak bisa berkomunikasi lagi.”

Hakim Tampubolon, yang dibesarkan sebagai seorang Kristen Protestan, menikah dengan seorang wanita Katolik, dan memiliki anak di luar nikah dengan wanita Katolik lainnya. Namun, anak mereka, Hakim Jr., tidak pernah dibaptis. Menjelang akhir hayatnya, Tampubolon menjalin hubungan dengan seorang wanita Sunda. Dalam salah satu suratnya kepada Hakim Jr. di Belanda, ia mengungkapkan bahwa ia telah masuk Islam, kemungkinan besar karena pengaruh pasangannya. Anehnya, informasi ini tampaknya tidak disampaikan kepada keluarganya di Indonesia atau mungkin diabaikan oleh mereka.

Hakim Tampubolon meninggal dunia dalam keadaan miskin pada 28 Februari 1987. Meskipun ia telah berpindah agama, pemakamannya dilakukan secara adat Protestan di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta.

### **Ucapan Terima Kasih**

Saya sangat berterima kasih kepada Hakim Tampoebolon Jr. dari Dinteloord, Belanda, yang telah menjadi narasumber utama saya. Dengan murah hati ia membagikan koleksi luas materi terkait ayahnya serta menyediakan foto-foto yang ditampilkan dalam artikel ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Mardohar Tampoebolon yang dengan sabar menjawab banyak pertanyaan saya, serta peneliti Belanda Rudi Harthoorn yang telah berbagi wawasan berharganya.

## Referensi

- Botman, Jochem. 2019. *De Tarzan van Limburg, Het onwaarschijnlijke leven van dubbelspion en meestersmokkelaar Pierre Sweerts*. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.
- Castles, Lance. 1972. *The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940*. Ph.D., Yale.
- Graaff, Bob de and Cees Wiebes. 1992. *Gladio der vrije jongens: Een particuliere geheime dienst in Koude Oorlogstijd*. s'Gravenhage: Sdu Uitgeverij Koniginengracht.
- Harthoorn, Rudi. 2015. *Zelfmoord op laagwater: landverraad en criminaliteit rond de inlichtingendienst*. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.
- Harthoorn, Rudi. 2009. *Vuile oorlog in Den Haag: bestrijding van het communistische verzet tijdens de Duitse bezetting*. Utrecht: Uitgeverij van Gruting.
- Harthoorn, Rudi. 2024a. <https://www.rudi-harthoorn.nl/met-betrekking-tot-mijn-twee-boeken/>
- Harthoorn, Rudi. 2024b. <https://www.rudi-harthoorn.nl/collaborateurs-spionnen-infiltranten-en-andere-anti-communisten-l-z/>
- Jaarverslag. 1945. *Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut: vijf en dertigste jaarverslag*. Amsterdam. Bijlage 1.
- Jahresbericht. 1907. *Jahresbericht der Rheinischen Missionsgesellschaft*. Barmen.
- Langenberg, Michael van. 1976. *National Revolution in North Sumatra: Sumatera Timur and Tapanuli, 1942-1950*. Thesis, University of Sydney.
- Notulen. 1943. "Notulen. Bestuursvergadering 5 December 1942. Notulen van de bestuurs- en algemeene vergaderingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië 1942–1943." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 1942: ix-xi.
- Pelzer, Karl J. 1978. *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947*. Leiden: Brill.
- Reid, Anthony. 1979. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Silaban, E., S. Suprayitno, dan N. Nuhung. 1924. "Konflik dan Resolusi: Peristiwa Berdarah di Tapanuli Masa Revolusi." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 8 (2): 104-119.
- Suprayitno. 2011. "Jalan keluar yang buntu: Federasi Sumatera sebagai gagasan kaum terpojok." Sita van Bemmelen & Remco Raben. peny... *Antara daerah dan negara: Indonesia tahun 1950-an. Pembongkaran narasi besar integrasi bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, pp. 64-105.
- Tampoebolon, H.A.m. 1944. "Het sneuvelen van Si Singa Mangaradja." *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, Tweede Reeks, Deel LXI. Leiden: E.J. Brill., pp. 459-482.
- Tampoebolon, Iskander. 1935. *Adat mendirikan hoeta. kampoeng. di Bataklanden*. Pematangsiantar: Siregar Philemon
- Tampoebolon, Hakim Jr. tanpa tahun. *Een prins in Dinteloord*. [https://www.nyenaenwasvannassau.nl/site/images/instantweb/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://images.memorix.nl/enb\\_175/download/download/531e868d-4b5c-5a10-c32f-6fc67e3c7741](https://www.nyenaenwasvannassau.nl/site/images/instantweb/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://images.memorix.nl/enb_175/download/download/531e868d-4b5c-5a10-c32f-6fc67e3c7741) (accessed 27-07-2024).